



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD tahun 2022.

Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bone dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kabupaten Bone atas Pengelolaan Keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- b. Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi Keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi Keuangan, mengevaluasi efektivitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4368);



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2048, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2021 Nomor 6);



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- (17) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (18) Peraturan Bupati Bone Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 111);
- (19) Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 59);
- (20) Peraturan Bupati Bone Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergilir Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 113);
- (21) Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penyisihan Piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.
- (22) Peraturan Bupati Bone Nomor 111 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 112).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bone disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan. Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD

memuat informasi tentang: Ekonomi makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian target kinerja APBD.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021*

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan Pemerintah Daerah serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang: rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021*

**BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Bidang Statistik Bappeda Kabupaten Bone, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan 10,58%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,27%;
- c. Gini Rasio sebesar 0,37%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,01%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,53%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 5,52; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp39,36.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dan jumlah dan prosentase penduduk miskin yang dirilis BPJS, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone dari tahun 2020 ke tahun 2021 memiliki kecenderungan yang menurun. Penurunan tingkat kemiskinan tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain, sinkronisasi data kemiskinan dan BDT melalui aplikasi SIKS-NG, meningkatkan kualitas akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pangan bagi penduduk miskin, memberikan perlindungan bagi masyarakat kelompok rentan, mendorong



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

pertumbuhan Ekonomi Daerah dan optimalisasi penggunaan dana desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan, serta adanya upaya mendesain berbagai kebijakan program kegiatan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 2.1
Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Bone

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun(%)
1	2	3	4	5
1	%	10,52	10,58	0,06%
2	Ribu Orang	79,64	80,34	0,70%

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bone 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bone pada tahun 2021 sebesar 10,52% mengalami kenaikan dimana pada tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 10,58% dan diharapkan pada tahun 2023 angka kemiskinan dapat ditekan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bone masih di atas Provinsi dan Nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bone

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun(%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	1,67%	1,35%	-0,32%
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,42%	0,26%	-0,16%

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bone 2023

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bone tahun 2021 yaitu 0,42 terjadi penurunan pada tahun 2022 yaitu 0,16.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bone tahun 2022 adalah sebesar 2,27% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bone

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun(%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,24	2,27	-1,97%

Sumber: Dokumen: BPS Kab. Bone

Meninjau dari TPT di Kabupaten Bone secara umum sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 bergerak naik meskipun melambat. Pergerakan TPT cukup tinggi ditunjukkan pada tahun 2021 yaitu 4,24% dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2 sampai 3 persen. Tahun 2021 tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bone meningkat lebih tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya namun masih dalam kondisi yang terkontrol. TPT Kabupaten Bone Tahun 2021 sebesar 4,24 % artinya dari 100 penduduk terdapat 4,24% orang yang termasuk golongan angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Hal ini menjadi bagian integral dari dampak pandemi covid-19 yang berdampak sistemik pada sektor ketenagakerjaan yang mulai mengalami peningkatan TPT ditahun 2019 yang kemudian berlanjut hingga tahun 2021. Maraknya kebijakan pembatasan-pembatasan usaha, kemudian banyaknya lapak atau usaha yang gulung tikar dan perdagangan secara *online* turut mengkonfirmasi terjadinya peningkatan TPT tak terkecuali di Kabupaten Bone.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu Negara atau Daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari indeks gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten, realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Bone tahun 2021 adalah sebesar 0,38 poin, angka ini turun jika dibandingkan dengan Indeks Gini tahun 2022 yang sebesar 0,37. Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks Gini. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1.

- Indeks Gini <0,35 : Kategori ketimpangan ‘rendah’
- Indeks Gini 0,35-0,5 : Kategori ketimpangan ‘moderat’
- Indeks Gini > 0,5 : Kategori ketimpangan ‘tinggi’

Indeks Gini Kabupaten Bone selama kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi, pada tahun pada tahun 2018 sebesar 0,41 dan mengalami kenaikan nilai Indeks Gini pada tahun 2019 sebesar 0,36 dan menunjukkan nilai yang semakin kecil pada tahun 2020 sebesar 0,4 pada tahun 2021 0,38 dan pada tahun 2022 0,37 . Ketimpangan pendapatan Kabupaten Bone masih turut terkonfirmasi rendah akibat dari dampak Pandemi Covid-19.

Pemulihan ekonomi yang diterapkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 menjadi momentum yang baik dalam mengakselerasikan penurunan Indeks Gini Kabupaten Bone yang diproyeksikan sebesar 0,37 pada tahun 2021. Apabilah pada tahun 2017 0,39 bergerak menuju angka 0,4 pada tahun 2020 atau dengan kata lain hanya dalam waktu empat tahun, derajat ketimpangan kabupaten Bone bergeser dari ketimpangan sedang menuju derajat ketimpangan moderat. Namun diproyeksikan dengan adanya kegiatan-kegiatan pemulihan ekonomi akan mempersempit ketimpangan pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui atau menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatu Negara atau daerah. IPM memiliki 3 (tiga) aspek utama, antara lain : Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta daya beli riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone meski mengalami peningkatan namun capaian skor IPM masih tertinggal dari skor IPM Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022 Nilai IPM Kabupaten Bone hanya sebesar 67,01%, sementara Sulawesi Selatan sudah mencapai 72,82%.

Data IPM Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021, sedangkan untuk tahun 2022 belum dipublikasikan secara resmi oleh BPS. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bone masih perlu dilakukan upaya percepatan, baik dari angka harapan hidup, rata-rata lama Sekolah maupun daya beli riil masyarakat. Indikator rata-rata lama sekolah dan daya beli riil menunjukkan capaian yang relatif rendah. Upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk mendorong percepatan IPM antara lain dengan adanya program kegiatan mengembalikan anak ke Bangku Sekolah (Gerakan Linmas), merupakan kebijakan pencegahan Pernikahan Dini sebagai salah satu penyebab meningkatnya angka putus sekolah, penyediaan layanan PAUD yang *holistic* terintegrasi, penerapan pendidikan eksklusif, menekan angka kematian ibu, mengembangkan sentra-sentra kegiatan ekonomi rakyat, memberikan dorongan dalam meningkatkan kemampuan permodalan, inovasi, kreativitas usaha serta perluasan pasar promosi Usaha Kecil dan Menengah.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone belum melampaui target pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam perubahan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2021 yaitu sebesar 6,68 persen dengan capaian 5,53 persen dan persentase capaian dari target RPJMD perubahan yaitu 82,78 persen. Capaian ini dianggap cukup



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

baik mengingat tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi juga mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 dan mulai membaik di tahun 2021. capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 belum memenuhi target daerah di RPJMD Perubahan. Namun, persentase capaian sebesar 82,78 persen dikategorikan berhasil dan bertumbuh positif setelah pandemi covid-19.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bone

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun(%)
1	PDRB ADHB (miliar Rupiah)	39.369.964,42	43.640.844,00	10,85%
2	PDRB ADHK (miliar rupiah)	23.273.868,50	24.491.730,00	5,23%
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53	5,23	-0,30

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bone

Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bone mengalami penurunan 0,3% di tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021.

2.1.6 Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bone dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan** (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi sedang** (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi berat** (*high inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

dikendalikan, dan (iv) **Hiperinflasi** (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tingkat Inflasi Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah sebesar 1,68% dengan kategori ringan.

2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB)

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Bone dalam melakukan pembangunan selalu menjadi topik hangat yang disoroti berbagai pihak. Demikian pula dengan naik dan turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kabupaten Bone Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2021 sebesar 39.369,69 miliar rupiah, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bone Tahun 2020– 2022

No	Indikator	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	22.108.038,50	23.273.868,50	24.491.730,00
2	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	36.560.640,40	39.369.964,42	43.640.844,00
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,25	5,53	5,23



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Bone (juta Rp) Tahun 2019 - 2022 (2010 = 1000)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	17.009.670,80	17.207.346,1	18.911.233,6	21.214.997,4
2	Pertambangan dan Penggalian	1.316.943,40	1.364.420	1.385.059,7	1.474.139,4
3	Industri Pengolahan	2.513.484,30	2.509.902,4	2.708.029,6	3.052.278,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	27.423,10	28.517,4	33.666,9	39.147,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.923,80	11.946,8	12.407,7	13.004,6
6	Konstruksi	3.833.839,10	3.958.631,5	4.316.785,3	4.855.785,6
7	Perdagangan Besar dan eceran	4.541.978,10	4.463.791,2	4.598.146,2	5.006.313
8	Transportasi dan pergudangan	836.263,90	755.518,2	817.417,8	957.851,5
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	190.433,00	177.779,4	185.338,8	212.092,7
10	Informasi dan Komunikasi	547.143,20	613.887,2	680.014,7	782.534,5
11	Jasa Keuangan dan asuransi	1.066.149,90	1.099.060,7	1.202.470,5	1.327.737,4
12	Real Estate	1.211.284,20	1.275.793,9	1.292.669,7	1.345.821,9
13	Jasa perusahaan	22.900,70	21.586,8	22.782	25.976,1
14	Administrasi Permintaan Pertahanan dan Jaminan social wajib	1.659.984,10	1.684.555,5	1.773.562,3	1.865.909,2
15	Jasa Pendidikan	798.992,50	898.180,8	911.199,6	903.942,2
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	320.356,70	371.507,2	392.544,5	410.870,9
17	Jasa Lainnya	127.068,40	118.215,4	126.635,3	152.442
	PODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	36.034.839,20	36.560.640,50	39.369.964,20	43.640.844,00

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Bone 2022

Sementara itu, peningkatan atau penurunan kinerja ekonomi, dapat dilihat melalui angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihasilkan melalui penghitungan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Bone tumbuh sebesar 5,23%. Apabila dicermati, terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun 2019 senilai 0,47%, dan perikanan.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

Dilihat dari sisi sektoral, pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Bone masih ditopang oleh sektor primer dengan share terhadap PDRB sekitar 52,94%. Peran besar sektor primer terutama karena besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki *share* sebesar 49,34% terhadap PDRB. Kondisi ini dapat dipahami mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Bone.

Tabel 2.7
Distribusi Produk Domestik Regional Tasa Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bone (%) Tahun 2019 - 2022 (2010 = 1000)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	47,2	47,07	48,03	48,61
2	Pertambangan dan Galian	3,65	3,73	3,52	3,38
3	Industri Pengolahan	6,98	6,87	6,88	6,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09
5	Limbah dan daur ulang	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	10,64	10,83	10,96	11,13
7	Perdagangan Besar dan eceran	12,6	12,21	11,68	11,47
8	Transportasi dan pergudangan	2,32	2,07	2,08	2,19
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	0,53	0,49	0,47	2,19
10	Informasi dan komunikasi	1,52	1,68	1,73	1,79
11	Jasa Keuangan dan asuransi	2,96	3,01	3,05	3,04
12	Real Estate	3,36	3,49	3,28	3,08
13	Jasa perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Permintaan Pertahanan dan Jaminan social wajib	4,61	4,61	4,5	4,28
15	Jasa Pendidikan	2,22	2,46	2,31	2,07
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	1,02	1	0,94
17	Jasa Lainnya	0,35	0,32	0,32	0,35
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,03	99,99	101,69

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Bone 2023

Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat nasional serta Produk Regional Bruto pada tingkat regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran keduanya menyajikan komponen dan nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Kongsruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, Pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa.

Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone tahun 2022 nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat menjadi Rp24.491.730,0 miliar. Dengan kata lain, perekonomian Kabupaten Bone tahun 2022 tumbuh sebesar 5,23% dibanding tahun 2021. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, struktur perekonomian kabupaten Bone masih didominasi oleh sektor-sektor yang ada pada kategori A, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal tersebut dapat dilihat pada kontribusi sektor-sektor yang ada pada kategori A terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Bone tahun 2021 yaitu sebesar 47,11%.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk/rumah tangga. Meskipun tingkat konsumsi penduduk bukan saja dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain tingkat harga, selera, gengsi, namun besarnya pengeluaran merupakan proksi terbaik untuk mengukur pendapatan. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Kadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk karena perubahan komposisinya merupakan petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sejalan dengan itu perubahan regulasi



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

di bidang Pengelolaan Keuangan Negara dan dasar penggerak sangat dinamis yang ditandai lahirnya berbagai produk hukum yang sangat strategis untuk dijadikan payung hukum atau landasan konstitusi bagi aparat penyelenggara Negara/Daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun belanja bagi pelaksana pemerintahan dan pembangunan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sendiri dalam tahun anggaran 2022, secara berlanjut masih terus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penerapan Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah;
2. Peningkatan fungsi Pasar Sentral dan Pasar Kecamatan; dan
3. Mengoptimalkan fungsi SKPD dalam mengelola pendapatan.

Penyempurnaan sistem pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan berusaha memantapkan mekanisme penyetoran, melakukan pengawasan serta menghindari kebocoran-kebocoran dibidang pendapatan daerah, dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memantapkan serta mengefektifkan pelaksanaan reorganisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur pengelola pendapatan daerah.
2. Peningkatan pembinaan aparat pengelola pendapatan daerah baik dari segi mental, kualitas maupun dari segi keterampilan (*skill*) sehingga benar-benar dapat diandalkan sebagai aparat pengelola pendapatan daerah yang tanggap, cakap, terampil, jujur, dan berwibawa.
3. Mengupayakan adanya penambahan/penggalian sumber-sumber pendapatan yang baru dengan memperhatikan potensi dan perkembangan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan koordinasi antara instansi dan unit kerja yang berkaitan dengan usaha peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Mendorong pengembangan dunia usaha dan Investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Belanja daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan Rencana Operasional Tahunan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, maka kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bone tahun 2022 ditetapkan antara lain:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi diupayakan melalui kebijakan di bidang ekonomi.
2. Peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat khususnya program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pengembangan kapasitas dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan, diorientasikan pada terciptanya akses yang sama oleh seluruh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara bertanggung jawab.

2.2.3 Kebijakan transfer

Kebijakan transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam kebijakan umum pembiayaan dalam tahun anggaran 2022, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang relatif sangat mendesak dan lebih merupakan pemenuhan kewajiban yang perlu direncanakan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bone. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan dengan alokasi anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Khusus mengenai SiLPA sebagaimana dimaksud di atas, pada dasarnya adalah merupakan perkiraan dari tertundanya pencairan dana alokasi khusus dan penyaluran bagian/hak kabupaten kota dari bagi hasil pajak dan bukan pajak serta kegiatan utang dan kegiatan lanjutan pada masing-masing SKPD.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.371.450.479.500,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp199.957.946.226,00, Pendapatan transfer sebesar Rp2.022.498.276.140,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp148.994.257.134,00. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.244.082.947.815,50 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp212.612.167.863,50. Pendapatan transfer sebesar Rp1.898.319.572.096,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp133.151.207.856,00.

Anggaran belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.743.218.519.992,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.734.758.073.986,00, belanja modal sebesar Rp562.602.848.955,00, belanja tidak terduga sebesar Rp16.808.275.444,00 dan belanja transfer sebesar Rp429.049.321.607,00. Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Bone tahun 2022 adalah sebesar Rp2.558.508.572.573,05 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.657.027.299.508,05. Belanja modal sebesar Rp469.829.489.314,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp4.026.489.901,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021*

**BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada tahun anggaran 2022 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka perubahan anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2022 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp2.371.450.479.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.244.082.947.815,50 atau 94,63% yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA dianggarkan sebesar Rp199.957.946.226,00 dan realisasi sebesar Rp212.612.167.863,50 atau 106,33%;
- 2) Pendapatan Transfer-LRA dianggarkan sebesar Rp2.022.498.276.140,00 dan realisasi sebesar Rp1.898.319.572.096,00 atau 93,86%
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp148.994.257.134,00 dan realisasi sebesar Rp133.151.207.856,00 atau 89,37%;

Perincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Bone TA 2022 sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp199.957.946.226,00 dan direalisasikan sebesar Rp212.612.167.863,50 atau mencapai 106,33%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

- 1) **Pajak Daerah**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp64.077.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.877.404.025,00 atau 110,61%;



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

- 2) **Retribusi Daerah**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp14.696.636.400,00 dan terealisasi sebesar Rp8.370.140.299,00 atau 56,95%;
- 3) **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah/BUMD yang dipisahkan**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 yaitu Dividen pada Bank Sulselbar pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp15.036.211.026,00 dan terealisasi sebesar Rp12.875.650.432,00 atau 85,63%; dan
- 4) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp106.148.098.800,00 dan terealisasi sebesar Rp120.488.973.107,50 atau 113,51%.

b) Pendapatan Transfer-LRA

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.022.498.276.140,00 dan realisasi sebesar Rp1.898.319.572.096,00 atau 93,86% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.470.495.526.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.407.035.869.693,00 atau 95,68% dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) **Dana Bagi Hasil-LRA**, pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp24.304.535.000,00 dan realisasi sebesar Rp36.421.291.923,00 atau 149,85%;
 - (b) **Dana Alokasi Umum-LRA**, pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp996.360.633.000,00 dan realisasi sebesar Rp990.740.188.963,00 atau 99,44%;
 - (c) **Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)-LRA**, pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp166.430.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp144.849.259.493,00 atau 87,03%; dan



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021*

- (d) **Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK)-LRA**, pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp283.400.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp235.025.129.314,00 atau 82,93%.
- 2) **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA**, pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp349.804.576.000,00 dan terealisasi sebesar Rp348.705.632.400,00 atau 99,69%; dan
- 3) **Transfer Pemerintah Provinsi-LRA**, pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp202.198.174.140,00 dan terealisasi sebesar Rp142.578.070.003,00 atau 70,51%.
- c) **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp148.994.257.134,00 dan terealisasi sebesar Rp133.151.207.856,00 atau 89,37%.

b. Belanja-LRA

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, iringasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya dan yang terakhir adalah belanja tak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan. Di dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022, dialokasikan dana untuk belanja dan transfer Daerah sebesar Rp2.743.218.519.992,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.558.508.572.573,05 atau 93,27% yang terdiri dari:

- 1) **Belanja Operasional-LRA** dianggarkan sebesar Rp1.734.758.073.986,00 dan realisasi sebesar Rp1.657.027.299.508,05 atau 95,52%;
- 2) **Belanja Modal-LRA** dianggarkan sebesar Rp562.602.848.955,00 dan realisasi sebesar Rp469.829.489.314,00 atau 83,51%;
- 3) **Belanja Tak Terduga-LRA** dianggarkan sebesar Rp16.808.275.444,00 dan realisasi sebesar Rp4.026.489.901,00 atau 23,96%;



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

- 4) **Belanja Transfer-LRA** dianggarkan sebesar Rp429.049.321.607,00 dan realisasi sebesar Rp427.625.293.850,00 atau 99,67%.

Perincian Belanja Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1) Belanja Operasional-LRA

Pada perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.734.758.073.986,00 dan realisasi sebesar Rp1.657.027.299.508,05 atau 95,52% dengan penggunaan sebagai berikut:

- a) **Belanja Pegawai**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp971.494.011.715,00 dan terealisasi sebesar Rp926.065.814.980,42 atau 95,32%;
- b) **Belanja Barang dan Jasa**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp699.072.149.563,00 dan terealisasi sebesar Rp673.192.582.515,63 atau 96,30%;
- c) **Belanja Bunga**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp11.779.858.644,00 dan terealisasi sebesar Rp11.949.537.909,00 atau 101,44%;
- d) **Belanja Subsidi**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.325.755.023,00 atau 93,03%;
- e) **Belanja Hibah**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp47.917.374.064,00 dan terealisasi sebesar Rp41.628.557.835,00 atau 86,88%;
- f) **Belanja Bantuan Sosial**, pada Perubahan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.994.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.865.051.245,00 atau 93,50%;

2) Belanja Modal-LRA

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp562.602.848.955,00 dan realisasi sebesar Rp469.829.489.314,00 atau 83,51%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

- a) **Belanja Tanah**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.851.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.851.700.000,00 atau 100,00 %;
- b) **Belanja Peralatan dan Mesin**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp64.806.405.549,00 dan terealisasi sebesar Rp59.253.809.459,00 atau 91,43%;
- c) **Belanja Gedung dan Bangunan**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp74.125.317.295,00 dan terealisasi sebesar Rp54.685.872.646,00 atau 73,77%;
- d) **Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp414.227.009.482,00 dan terealisasi sebesar Rp346.488.041.867,00 atau 83,65%;
- e) **Belanja Aset Tetap Lainnya**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp5.592.416.629,00 dan terealisasi sebesar Rp5.550.065.342,00 atau 99,24%;
- f) **Belanja Aset lainnya**, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan tidak dianggarkan.

3) Belanja Tak Terduga-LRA

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp16.808.275.444,00 dan terealisasi sebesar Rp4.026.489.901,00 atau 23,96%.

4) Belanja Transfer-LRA

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp429.049.321.607,00 dan realisasi sebesar Rp427.625.293.850,00 atau 99,67%.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

c. Pembiayaan

Sumber-sumber Pembiayaan Daerah Kabupaten Bone dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada tahun anggaran 2022 setelah Perubahan sebesar Rp386.768.040.492,00 dan terealisasi sebesar Rp385.779.775.491,83 atau 99,74% yang terdiri:

- a) Penggunaan Sisa lebih Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2022 setelah Perubahan dianggarkan sebesar Rp107.021.800.187,00 dan terealisasi sebesar Rp107.012.800.186,83 atau 99,99%.
- b) Pemberian Pinjaman Daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp279.746.240.305,00 dan terealisasi sebesar Rp278.766.975.305,00 atau 99,65%.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada tahun anggaran 2022 setelah Perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100,00% yang terdiri dari:

- a) Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022 setelah Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00%;
- b) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022 setelah Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00%;
- c) Pembayaran Utang Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan.

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan urusan Pemerintah Kabupaten Bone. Target kinerja anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dengan efisien pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
 dan 2021

Tabel 3.1
 Rekapitulasi Pendapatan Per Urusan
 Tahun Anggaran 2022

KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	94.577.863.200,00	110.912.653.270,00	16.334.790.070,00	117,27
1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Kesehatan	88.911.043.200,00	109.326.774.929,00	20.415.731.729,00	122,96
1.02.01	Dinas Kesehatan	13.911.043.200,00	27.630.037.545,00	13.718.994.345,00	198,62
1.02.02	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru (BLUD)	75.000.000.000,00	81.696.737.384,00	6.696.737.384,00	108,93
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.656.820.000,00	1.575.878.341,00	(4.080.941.659,00)	27,86
1.03.01	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang	5.656.820.000,00	1.575.878.341,00	(4.080.941.659,00)	27,86
1.03.03	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
1.05.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.015.100.000,00	1.738.369.258,00	(1.276.730.742,00)	57,66
2.07	Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0701	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
 dan 2021

KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
2.11	Lingkungan Hidup	250.000.000,00	259.250.000,00	9.250.000,00	103,70
2.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	250.000.000,00	259.250.000,00	9.250.000,00	103,70
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Perhubungan	2.665.100.000,00	1.401.122.000,00	(1.263.978.000,00)	52,57
2.15.01	Dinas Perhubungan	2.665.100.000,00	1.401.122.000,00	(1.263.978.000,00)	52,57
2.16	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01	Dinas Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	100.000.000,00	77.997.258,00	(22.002.742,00)	78,00
2.19.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	100.000.000,00	77.997.258,00	(22.002.742,00)	78,00
2.22	Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.838.616.400,00	3.825.063.500,00	(1.013.552.900,00)	79,05
3.25	Kelautan dan Perikanan	125.000.000,00	145.320.000,00	20.320.000,00	116,26
3.25.01	Dinas Perikanan	125.000.000,00	145.320.000,00	20.320.000,00	116,26
3.26	Pariwisata	1.000.000.000,00	476.195.000,00	(523.805.000,00)	47,62
3.26.01	Dinas Pariwisata	1.000.000.000,00	476.195.000,00	(523.805.000,00)	47,62
3.27	Pertanian	1.025.000.000,00	762.250.500,00	(262.749.500,00)	74,37
3.27.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	950.000.000,00	716.250.500,00	(233.749.500,00)	75,39
3.27.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan	75.000.000,00	46.000.000,00	(29.000.000,00)	61,33
3.30	Perdagangan	2.688.616.400,00	2.441.298.000,00	(247.318.400,00)	90,80



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
 dan 2021

KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
3.30.01	Dinas Perdagangan	2.688.616.400,00	2.441.298.000,00	(247.318.400,00)	90,80
3.31	Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01	Dinas Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.269.018.899.900,00	2.127.606.861.787,50	(141.412.038.112,50)	93,77
5.01	Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Keuangan	2.269.018.899.900,00	2.127.606.861.787,50	(141.412.038.112,50)	93,77
5.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.204.836.299.900,00	2.056.645.877.762,50	(148.190.422.137,50)	93,28
5.02.03	Badan Pendapatan Daerah	64.182.600.000,00	70.960.984.025,00	6.778.384.025,00	110,56
5.03	Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.371.450.479.500,00	2.244.082.947.815,50	(127.367.531.684,50)	94,63



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	29.317.715.751,00	28.944.799.322,00	(372.916.429,00)	98,73
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	15.251.701.257,00	15.056.710.929,00	(194.990.328,00)	98,72
1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.768.567.868,00	8.625.558.286,00	(143.009.582,00)	98,37
1.05.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.297.446.626,00	5.262.530.107,00	(34.916.519,00)	99,34
1.06	Sosial	7.428.055.381,00	7.134.025.627,00	(294.029.754,00)	96,04
1.06.01	Dinas Sosial	7.428.055.381,00	7.134.025.627,00	(294.029.754,00)	96,04
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	125.661.233.484,00	121.682.794.279,00	(3.978.439.205,00)	96,83
2.07	Tenaga Kerja	4.803.151.890,00	4.679.589.084,00	(123.562.806,00)	97,43
2.07.01	Dinas Ketenagakerjaan	4.803.151.890,00	4.679.589.084,00	(123.562.806,00)	97,43
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.633.937.632,00	3.407.696.388,00	(226.241.244,00)	93,77
2.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.633.937.632,00	3.407.696.388,00	(226.241.244,00)	93,77
2.09	Pangan	13.555.019.864,00	13.410.168.521,00	(144.851.343,00)	98,93
2.09.01	Dinas Ketahanan Pangan	13.555.019.864,00	13.410.168.521,00	(144.851.343,00)	98,93
2.11	Lingkungan Hidup	13.811.729.711,00	13.541.225.729,00	(270.503.982,00)	98,04
2.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	13.811.729.711,00	13.541.225.729,00	(270.503.982,00)	98,04
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.947.115.093,00	4.772.935.032,00	(174.180.061,00)	96,48
2.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.947.115.093,00	4.772.935.032,00	(174.180.061,00)	96,48
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.510.220.343,00	13.692.480.566,00	(817.739.777,00)	94,36
2.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.510.220.343,00	13.692.480.566,00	(817.739.777,00)	94,36
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.624.396.153,00	16.514.957.921,00	(1.109.438.232,00)	93,71
2.14.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.624.396.153,00	16.514.957.921,00	(1.109.438.232,00)	93,71
2.15	Perhubungan	9.058.915.549,00	8.690.329.122,00	(368.586.427,00)	95,93
2.15.01	Dinas Perhubungan	9.058.915.549,00	8.690.329.122,00	(368.586.427,00)	95,93
2.16	Komunikasi dan Informatika	7.609.243.699,00	7.427.506.581,00	(181.737.118,00)	97,61
2.16.01	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	7.609.243.699,00	7.427.506.581,00	(181.737.118,00)	97,61
2.17	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.973.783.570,00	3.903.866.833,00	(69.916.737,00)	98,24
2.17.01	Dinas Koperasi	3.973.783.570,00	3.903.866.833,00	(69.916.737,00)	98,24
2.18	Penanaman Modal	7.619.326.538,00	7.400.236.923,00	(219.089.615,00)	97,12



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

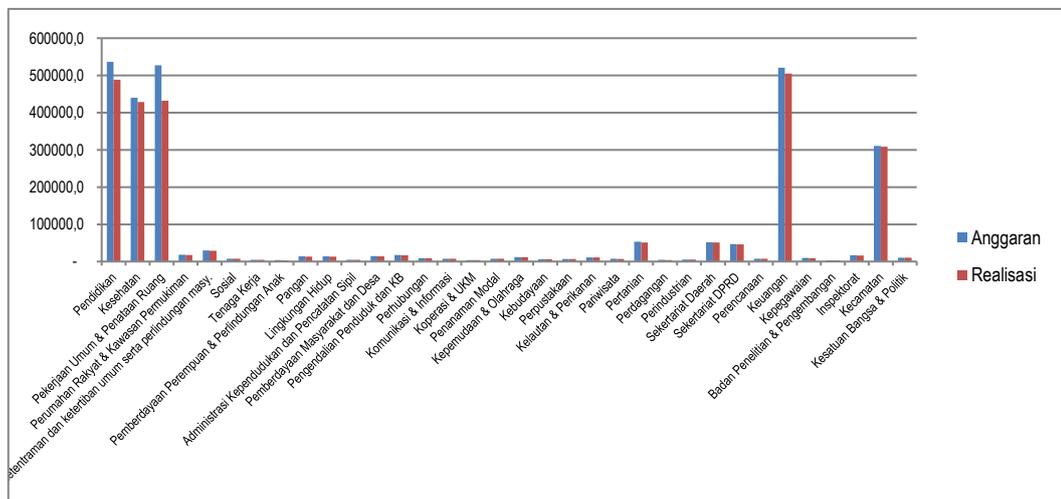
KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
2.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.619.326.538,00	7.400.236.923,00	(219.089.615,00)	97,12
2,19	Kepemudaan dan Olah Raga	12.064.301.241,00	11.967.150.594,00	(97.150.647,00)	99,19
2.19.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12.064.301.241,00	11.967.150.594,00	(97.150.647,00)	99,19
2,22	Kebudayaan	5.902.220.328,00	5.763.433.348,00	(138.786.980,00)	97,65
2.22.01	Dinas Kebudayaan	5.902.220.328,00	5.763.433.348,00	(138.786.980,00)	97,65
2,23	Perpustakaan	6.547.871.873,00	6.511.217.637,00	(36.654.236,00)	99,44
2.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.547.871.873,00	6.511.217.637,00	(36.654.236,00)	99,44
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	81.251.753.699,00	78.181.838.787,00	(3.069.914.912,00)	96,22
3.25	Kelautan dan Perikanan	10.972.897.139,00	10.765.507.538,00	(207.389.601,00)	98,11
3.25.01	Dinas Perikanan	10.972.897.139,00	10.765.507.538,00	(207.389.601,00)	98,11
3.26	Pariwisata	7.183.475.920,00	6.942.262.502,00	(241.213.418,00)	96,64
3.26.01	Dinas Pariwisata	7.183.475.920,00	6.942.262.502,00	(241.213.418,00)	96,64
3.27	Pertanian	52.956.344.403,00	50.737.455.227,00	(2.218.889.176,00)	95,81
3.27.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.891.465.990,00	9.007.681.855,00	(883.784.135,00)	91,07
3.27.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan	43.064.878.413,00	41.729.773.372,00	(1.335.105.041,00)	96,90
3.30	Perdagangan	4.501.236.796,00	4.191.708.568,00	(309.528.228,00)	93,12
3.30.01	Dinas Perdagangan	4.501.236.796,00	4.191.708.568,00	(309.528.228,00)	93,12
3.31	Perindustrian	5.637.799.441,00	5.544.904.952,00	(92.894.489,00)	98,35
3.31.01	Dinas Perindustrian	5.637.799.441,00	5.544.904.952,00	(92.894.489,00)	98,35
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	98.800.856.826,00	97.128.196.128,94	(1.672.660.697,06)	98,31
4.01	Sekretariat Daerah	51.833.374.740,00	50.764.886.912,94	(1.068.487.827,06)	97,94
4.01.01	Sekretariat Daerah	51.833.374.740,00	50.764.886.912,94	(1.068.487.827,06)	97,94
4.02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46.967.482.086,00	46.363.309.216,00	(604.172.870,00)	98,71
4.02.01	Sekretariat DPRD	46.967.482.086,00	46.363.309.216,00	(604.172.870,00)	98,71
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	541.132.796.866,00	524.129.388.056,05	(17.003.408.809,95)	96,86
5.01	Perencanaan	7.694.408.000,00	7.395.843.434,00	(298.564.566,00)	96,12
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.694.408.000,00	7.395.843.434,00	(298.564.566,00)	96,12
5.02	Keuangan	520.806.418.361,00	504.856.615.084,05	(15.949.803.276,95)	96,94
5.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	507.300.634.596,00	491.903.368.466,05	(15.397.266.129,95)	96,96
5.02.03	Badan Pendapatan Daerah	13.505.783.765,00	12.739.746.618,00	(766.037.147,00)	94,33
5.03	Kepegawaian	9.711.509.661,00	9.227.433.773,00	(484.075.888,00)	95,02



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.711.509.661,00	9.227.433.773,00	(484.075.888,00)	95,02
5.05	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.920.460.844,00	2.862.995.765,00	(57.465.079,00)	98,03
5.05.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.920.460.844,00	2.862.995.765,00	(57.465.079,00)	98,03
6	UNSUR PENGAWAS	17.119.289.818,00	15.962.177.833,00	(1.157.111.985,00)	93,24
6.01	Inspektorat	17.119.289.818,00	15.962.177.833,00	(1.157.111.985,00)	93,24
6.01.01	Inspektorat Daerah	17.119.289.818,00	15.962.177.833,00	(1.157.111.985,00)	93,24
7	UNSUR KEWILAYAAN	310.423.794.862,00	308.577.748.860,79	(1.846.046.001,21)	99,41
7.01	Kecamatan	310.423.794.862,00	308.577.748.860,79	(1.846.046.001,21)	99,41
7.01.01	Kecamatan	310.423.794.862,00	308.577.748.860,79	(1.846.046.001,21)	99,41
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.295.018.084,00	10.126.396.408,00	(168.621.676,00)	98,36
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	10.295.018.084,00	10.126.396.408,00	(168.621.676,00)	98,36
8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.295.018.084,00	10.126.396.408,00	(168.621.676,00)	98,36
	JUMLAH	2.743.218.519.992,00	2.558.508.572.573,05	(184.709.947.418,95)	93,27



Gambar 3.2
 Diagram Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Belanja Urusan
 Pemerintah Kabupaten Bone
 Tahun Anggaran 2022

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan berdasarkan urusan Pemerintah Kabupaten Bone yang berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dan kegiatan yang telah diuraikan sebagaimana pada Bab III angka 2.3 dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Anggaran Pendapatan merupakan target Pendapatan pada setiap urusan yaitu Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan menurut urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari: Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bila dibandingkan dengan Target terdapat Selisih Lebih sebesar Rp13.718.994.345,00 Yaitu Dinas Kesehatan dan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah lebih sebesar Rp6.696.737.384,00, selisih kurang tersebut berasal dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari: Lingkungan Hidup, Perhubungan, dan Kepemudaan dan Olahraga tersebut bila dibandingkan dengan target terdapat selisih lebih sebesar Rp9.250.000,00 yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Selisih kurang tersebut ada pada Dinas Perhubungan dan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan, dan Dinas Perdagangan tersebut bila dibandingkan dengan target terdapat selisih lebih pada Dinas Perikanan sebesar Rp20.320.000,00, serta selisih kurang tersebut terdapat pada Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan, dan Dinas Perdagangan. Dan Unsur Urusan Penunjang Urusan Pemerintah yaitu Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian dengan target terdapat selisih Lebih sebesar Rp6.778.384.025.00 yaitu Badan Pendapatan Daerah;
- 3) Anggaran Pendapatan dibandingkan realisasi Pendapatan pada urusan ada yang kurang atau tidak melebihi target dan yang paling rendah adalah pada urusan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar 57,66% terdapat pada Dinas Perhubungan yang paling rendah realisasinya dari target sebesar 52,57% dan adapun yang melebihi target terdapat pada unsur Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar 117,27% yaitu Dinas Kesehatan sebesar 198,62%;

- 4) Anggaran Belanja dan transfer merupakan anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer; dan
- 5) Anggaran belanja dengan realisasi belanja setiap urusan bila dibandingkan terdapat selisih kurang dari anggaran belanja dan yang paling rendah yaitu pada urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 90,00% yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 27,86%.

Berdasarkan data tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa belanja pada setiap urusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2022 dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala sebagaimana yang dihadapi pada tahun 2022 lalu sama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2020 antara lain:

a. Hambatan atau Kendala Utama Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan yang sama dengan Tahun 2021, yaitu:

- 1) Beberapa regulasi peraturan daerah dan pendukungnya yang diubah atau disesuaikan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum sepenuhnya berjalan efektif, karena masih dalam tahap sosialisasi;
- 2) Masih terdapat beberapa penyesuaian peraturan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021

Daerah yang belum sempurna, sehingga memerlukan perubahan/penyempurnaan;

- 3) Permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone masih dipengaruhi situasi dan kondisi yang berkembang saat ini sehingga dalam melaksanakan pemungutan atau penagihan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bone sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat dan menyesuainya dengan kebijakan sesuai keadaan lapangan dan kondisi-kondisi tertentu; khususnya *self assesment* wajib pajak tidak menyampaikan (menyetorkan) sesuai jumlah yang seharusnya.
- 4) Disamping hal tersebut di atas, permasalahan Pendapatan Asli Daerah juga terletak pada:
 - a) Kemampuan sumber daya manusia atau aparat penagih pendapatan masih perlu ditingkatkan;
 - b) Sarana dan prasarana masih terbatas;
 - c) Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kewajibannya masih kurang;

Permasalahan Pendapatan Daerah, juga ada pada bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak, khususnya bagi hasil bukan pajak sektor pertambangan gas alam, dimana Kabupaten Bone sebagai satu-satunya daerah penghasil tambang gas alam di Sulawesi Selatan, ternyata sampai pada tahun anggaran 2022 bagi hasil yang didapatkan masih minim jika dibandingkan dengan tingkat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan di Kabupaten Bone. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun anggaran 2022 ini masih perlu mengadakan pendekatan-pendekatan khusus dengan Pemerintah Pusat untuk membicarakan pembagian sesuai potensi objek yang dimiliki Kabupaten Bone, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Hambatan atau Kendala Utama Belanja Daerah

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan masyarakat, bagi Pemerintah Daerah dihadapkan dengan permasalahan belanja sebagai berikut:

- 1) Karena keterbatasan anggaran sehingga usulan belanja kegiatan dari hasil musrembang yang telah ditampung dan diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait tidak semuanya dapat diakomodir hanya dalam satu tahun



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

anggaran, demikian juga halnya usulan belanja rutin daerah dari unit kerja tidak semuanya terpenuhi sehingga dilakukan rasionalisasi belanja dengan mempertimbangkan prioritas usulan kegiatan; dan

- 2) Dalam pelaksanaan anggaran sering dilakukan revisi belanja sebelum penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Masih lemahnya SDM yang memahami pengelolaan keuangan dengan baik serta dukungan sarana dan prasarana belum maksimal.

c. Hambatan atau Kendala Utama Pembiayaan

Untuk pembiayaan, pada tahun anggaran 2022 tidak mengalami hambatan atau kendala dalam realisasinya.